

ABSTRAK

Irham Maulana Syaifudin, NIM 12101173027, “Penyewaan Tanah Kas Desa dengan Sistem Lotre Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Muamalah” (Studi pada Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I, M. Hum.

Kata Kunci: penyewaan, tanah kas desa, fiqh muamalah, undian

Penyewaan tanah kas desa Sukowiyono yang dikelola dengan sistem lotre, dimana pada umumnya tanah kas desa dikelola dengan sistem lelang. Adapun *qur'ah* (undian/lotre) dilakukan dengan maksud mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama berhak, tetapi tidak mungkin semua mendapat hak tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menghasrkan adanya sistem keterbukaan dan fiqh muamalah.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ? (2) Bagaimana penyewaan tanah kas desa dengan system lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? (3) Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ?

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, memilih tempat ini sebagai objek penelitian karena menggunakan sistem lotre. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni dari Bulan Juni hingga akhir Bulan Agustus 2021. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di Desa Sukowiyono. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian ini tidak diragukan lagi untuk dijadikan sebagai karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem lotre dalam penyewaan tanah kas desa Sukowiyono dipraktikan dengan cara membuka pendaftaran untuk calon penyewa bagi warga desa setempat, mengundnag mereka ke balai desa untuk dilotre namanya dan memutuskan 6 nama yang keluar dalam lotre sebagai penyewa. Dan menetapkan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000 dengan tiga tahap pembayaran meliputi uang muka sejumlah Rp. 100.000 dibayar pada saat setelah nama yang bersangkutan keluar dalam lotre sebagai penyewa, 50% dibayar dalam jangka waktu 15 hari setelah membayar uang muka, dan pelunasannya pada saat setelah panen. (2) Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre yang diberlakukan dalam penyewaan tanah kas desa Sukowiyono adalah boleh karena telah memenuhi sebagaimana asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan kepastian ekonomi. (3) Ditinjau dari jenis fiqh muamalah, penyewaan tanah kas desa Sukowiyono hukumnya boleh karena undian/lotre yang dilakukan tidak mengandung *mudharat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik dari pihak pengundi maupun yang diundi.

ABSTRACT

Irham Maulana Syaifudin, NIM 12101173027, "Village Cash Land Lease with Lottery System Judging from Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Muamalah Fiqh" (Study in Sukowiyono Village, Padas District, Ngawi Regency), Department of Sharia Economic Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, Supervisor: Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I, M. Hum.

Keywords: rental, village treasury land, muamalah fiqh, lottery

Sukowiyono village treasury land leases are managed by a lottery system, where in general village treasury lands are managed by an auction system. The qur'ah (lottery) is carried out with the intention of getting the rights of a number of people who are also entitled to it, but it is not possible for all of them to get that right. Therefore, researchers are interested in conducting research on renting village treasury land with a lottery system in terms of Law Number 6 of 2014 concerning villages which requires a system of openness and fiqh muamalah.

The formulations in this study are: (1) How to rent village treasury land with a lottery system in Sukowiyono Village, Padas District, Ngawi Regency? (2) How is the rental of village treasury land with a lottery system in Sukowiyono Village, Padas District, Ngawi Regency in terms of Law Number 6 of 2014 concerning Villages? (3) What is the view of muamalah fiqh on the rental of village treasury land with a lottery system in Sukowiyono Village, Padas District, Ngawi Regency?

This research uses empirical juridical. The location of this research is located in Sukowiyono Village, Padas District, Ngawi Regency, choosing this place as the object of research because it uses a lottery system. This research was conducted for 2 months, namely from June to the end of August 2021. The type of data used is primary data taken from interviews and secondary data collected by documentation techniques, and observations made in Sukowiyono Village. While the data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. So that this research is no doubt to be used as a scientific work.

The results of this study indicate that (1) The lottery system in leasing the Sukowiyono village treasury land is practiced by opening registrations for prospective tenants for local villagers, inviting them to the village hall for a lottery of their names and deciding the 6 names that come out in the lottery as tenants. And set a rental fee of Rp. 4,000,000 with three stages of payment including an advance of Rp. 100,000 is paid at the time after the name concerned comes out in the lottery as a tenant, 50% is paid within 15 days after paying the down payment, and the payment is paid after harvest. (2) Judging from Law Number 6 of 2014 concerning villages, renting village treasury land with a lottery system applied in the Sukowiyono village treasury land rental is permissible because it has fulfilled the principles of public interest, functionality, legal certainty, transparency, efficiency, effectiveness, and economic certainty. (3) Judging from the type of fiqh muamalah, it is legal to rent the land of the Sukowiyono village treasury because the lottery/lottery carried out does not contain any harm and does not result in losses, either from the lottery party or the lottery.

وأظهرت نتائج هذه البحث أن (١) نظام اليانصيب في قرية سوكويونو النقدية تأجير الأراضي تمارس عن طريق فتح التسجيل للمستأجرين المحتملين للقرويين المحليين، وأخذهم إلى قاعة القرية لاسم اليانصيب والبت في ٦ أسماء التي خرجت في اليانصيب كمستأجرين. وحدد رسم إيجار قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ روبية مع ثلاث مراحل للدفع بما في ذلك دفعة مقدمة قدرها ١٠٠,٠٠٠ روبية دفعت في ذلك الوقت بعد أن خرج الاسم المعني في اليانصيب كمستأجر، ودفعت ٥٠٪ في غضون فترة ١٥ يوما بعد دفع الدفعة المقدمة، والسداد في ذلك الوقت بعد الحصاد. (٢) بناءً على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن القرى ، فإن تأجير أراضي الخزانة في القرية بنظام اليانصيب المطبق في سوكويونو ، يُسمح بتأجير أرض الخزانة لقرية سوكويونو لأنها استوفت مبادئ المصلحة العامة ، والوظيفة ، واليقين القانوني ، والانفتاح ، والكفاءة ، والفعالية ، و اليقين. الاقتصاد. (٣) انطلاقاً من نوع الفقه المعامله ، فإنه من القانوني تأجير أرض خزانة قرية سوكويونو لأن اليانصيب / اليانصيب المنفذ لا يحتوي على أي ضرر ولا ينتج عنه خسائر ، سواء من حفل اليانصيب أو اليانصيب.